

RENCANA KERJA

2025

Disusun Oleh :

DINAS
KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN
GROBOGAN

 kominfo@grobogan.go.id

 (0292) 421059

 www.diskominfo.grobogan.go.id

 Jalan Mayjend. Sutoyo Siswomiharjo Nomor 48, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Mayjend. Sutoyo Siswomiharjo No. 48 Purwodadi

Telp. 0292 421059 Kode Pos 58111

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan telah menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan ini berisi tentang Rencana Pelaksanaan Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025.

Ucapan terima kasih yang tulus kami berikan kepada seluruh pihak - pihak yang terkait dan terlibat dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya, oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan yang akan datang.

Semoga Penyusunan Rencana Kerja ini bermanfaat untuk keberlangsungan dan perkembangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan pada khususnya dan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan pada umumnya.

Purwodadi, 20 Maret 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN GROBOGAN



Drs. MUZAKIR WALAD, M.T.

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19730824 199203 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB. I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang		4
1.2 Landasan Hukum		4
1.3 Maksud dan Tujuan		6
1.4 Sistematika Penulisan		6
BAB. II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah		9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan		17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD		21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	...	23
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH		
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional		25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah		26
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		
		27
BAB. V PENUTUP		
		43

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gtrobogan Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya

dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Renja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Renja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan. Untuk itu, dipandang perlu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan menyusun dokumen Renja untuk mewujudkan Grobogan yang lebih sejahtera, berdaya saing, beriman dan berbudaya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025 disusun dengan maksud :

1. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang komprehensif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi (Tupoksi) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.
2. Sebagai pedoman unit organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi serta penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun

Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Grobogan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. Selain dari pada itu evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada Publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program Pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang

berkualitas dan profesional yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan.

Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dan pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan sampai dengan tahun berjalan disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Grobogan s/d Tahun 2024

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2024	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN	% Layanan publik yang	97 %	95 %	96 %	96 %	100 %	97 %	97%	100 %

				KOMUNIKASI PUBLIK	diselenggarakan secara online dan terinteragrasi								
2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten yang dikelola	77 %	75 %	76 %	76 %	100 %	77 %	77 %	100 %
2	16	03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% Nama Domain dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Dan Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet Dari Dinas Kominfo	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	16	03	2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

					(E-Government									
2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	16	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	16	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	16	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2	16	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	% Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	20	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	% OPD yang memiliki buku profil data statistik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2	21	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	% Informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampai kan kepada pihak terkait	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	21	02	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% OPD dengan pengamanan informasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2	21	02	2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	% OPD dengan pengamanan informasi	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang komunikasi, informasi dan statistik sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang komunikasi, informasi dan statistik, dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informasi, statistik dan persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan mengampu Misi ke 4 Kepala Daerah terpilih yaitu Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni, Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan. Berikut kami sajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Grobogan sebagaimana pada tabel 2. 2.

Capaian kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria serta standar pelayanan minimal maupun terhadap indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Grobogan

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks SPBE	Indeks SPBE pada instrumen penilaian KEMENPAN RB	Indeks	3,2	3,3	3,4	3,5	3,2	3,3	3,4	3,5	
2	Indeks KAMI	Indeks KAMI pada instrumen penilaian BSSN	Indeks	II	II+	III	III+	II	II+	III	III+	
3	% Data Urusan Teranalisis	Data Urusan Wajib dan Pilihan yang teranalisis ----- x 100% Data Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah kota	%	35	50	65	75	40	60	70	80	
4	SAKIP	Evaluasi oleh Kemen PAN-RB	Nilai	B	BB	BB	BB	B	BB	BB	BB	
5	IKM	Rerata capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik pada PD	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	B	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

2.3.1. Penentuan Isu-isu strategis

Faktor – faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

Faktor kekuatan (Strenghts) :

1. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
2. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik utama;
3. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah;
4. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral.

Faktor Kelemahan (Weakness) :

1. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Belum optimal;
2. Koordinasi internal belum optimal;
3. Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
4. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai.

Faktor Tantangan (Threats) :

1. Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM maupun dukungan sarana / prasarana;
2. Belum terkendalinya pembangunan menara / tower telekomunikasi yang mengakibatkan pemanfaatannya tidak efisien dan konsentrasinya layanan telekomunikasi pada komersial dan mengurangi keindahan / estetika wilayah;
3. Infrastruktur Data Center masih kurang ideal;
4. Infrastruktur Jaringan Internet untuk Layanan publik belum ada;
5. Infrastruktur dan prasarana persandian belum tersedia;
6. Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi belum maksimal;
7. Aplikasi yang ada selama ini berjalan pada platform yang cenderung berbeda di tiap OPD;

8. Data yang tidak sistematis dan tidak terstruktur;
9. Data yang tidak faktual dan cenderung sulit untuk dijadikan sebagai standar akuntabilitas kinerja;
10. Adanya kesulitan untuk memperoleh data dengan mudah dan efektif;
11. Serangan dari luar yang mengancam website yang ada;
12. Data yang berpotensi rusak atau hilang;
13. Beberapa website yang lebih sering mendapat serangan ketika sedang menghadapi even penting (lomba website contohnya);
14. Data dan informasi yang ada kurang di backup;
15. Tren analisis Big Data yang belum terkomodasi dengan baik di Kabupaten Grobogan;
16. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*) di Kabupaten Grobogan belum optimal.

Faktor Peluang (Oppurtinity) :

1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan;
2. Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak kepada semakin mudahnya mengakses informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan;
3. Semakin bertumbuhkembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang informasi dan komunikasi;
4. Mewujudkan infrastruktur Data Center yang menjamin Kelangsungan Bisnis, memberikan Keamanan Data Center, memberikan Optimasi Aplikasi dan memberikan Penyimpanan Data;
5. Membangun infrastruktur internet di area publik menuju terwujudnya Smart City;
6. Mewujudkan infrastruktur dan sarana prasarana persandian guna meningkatkan kebutuhan persandian untuk keamanan berita;
7. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi guna mencukupi database menara telekomunikasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
8. Data sebagai faktor utama terselenggaranya pembangunan;
9. Data sebagai indikator kinerja pemerintahan;

10. Data informasi sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat agar lebih maju dan sejahtera;
11. Aplikasi yang aman, andal dan layak untuk digunakan atau akses;
12. Terjaminnya keamanan data informasi pada suatu aplikasi;
13. Data dan aplikasi yang terlindungi dari ancaman yang berpotensi mengganggu jalannya pembangunan.

2.3.2. Formulasi Isu-Isu Penting untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan

Berkaitan dengan peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik. Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi.
2. Belum optimalnya implementasi pengelolaan sandi dan telekomunikasi untuk informasi klasifikasi yang dapat diamankan pemerintah Kabupaten Grobogan.
3. Belum optimalnya pengelolaan data sektoral yang valid, update, dan mudah diakses.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa review diperlukan pada Rancangan Awal RKPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menunjang sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Berikut ini akan disampaikan Review Rancangan Awal RKPD 2025 yang berdasarkan analisis kebutuhan dan akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Grobogan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Grobogan	% Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi	98 %	1.335.282.900	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Grobogan	% Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi	98 %	1.335.282.900	
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Grobogan	% informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten yang dikelola	78 %	1.335.282.900	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Grobogan	% informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten yang dikelola	78 %	1.335.282.900	
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI	Kab. Grobogan	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang	100 %	3.081.340.000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI	Kab. Grobogan	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	100 %	3.081.340.000	

	INFORMATIKA		terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			INFORMATIKA		yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
4	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Grobogan	% Nama Domain dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Dan Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet Dari Dinas KOMINFO	100 %	107.000.000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Grobogan	% Nama Domain dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Dan Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet Dari Dinas KOMINFO	100 %	107.000.000	
5	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Grobogan	% Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	100 %	2.974.340.000	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Grobogan	% Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	100 %	2.974.340.000	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Grobogan	% layanan dukungan administrasi kesekretariatan	100 %	12.225.275.600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Grobogan	% layanan dukungan administrasi kesekretariatan	100 %	12.225.275.600	

	KABUPATEN/KOTA		yang sesuai SOP			KABUPATEN/ KOTA		yang sesuai SOP			
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	% dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100 %	530.505.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	% dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100 %	530.505.000	
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	% pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 %	4.452.749.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	% pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 %	4.452.749.000	
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	% penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	100 %	266.460.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	% penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	100 %	266.460.000	
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	% pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.269.525.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	% pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.269.525.000	
11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Grobogan	% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	192.751.600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Grobogan	% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	192.751.600	

12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Grobogan	% pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	212.935.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Grobogan	% pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	212.935.000	
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Grobogan	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	5.300.350.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Grobogan	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	5.300.350.000	
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Grobogan	% Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	100 %	295.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Grobogan	% Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	100 %	295.000.000	
15	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Grobogan	% OPD yang memiliki buku profil data statistik	100 %	295.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Grobogan	% OPD yang memiliki buku profil data statistik	100 %	295.000.000	
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN	Kab. Grobogan	% Informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi	100 %	849.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Kab. Grobogan	% Informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan	100 %	849.500.000	

	INFORMASI		yang tersampai kan kepada pihak terkait			PENGAMANA N INFORMASI		telekomunikasi yang tersampai kan kepada pihak terkait			
17	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Grobogan	% OPD dengan pengamanan informasi	100 %	778.000.000	Penyelenggara an Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta	Kab. Grobogan	% OPD dengan pengamanan informasi	100 %	778.000.000	
18	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Grobogan	% OPD dengan pengamanan informasi	100 %	71.500.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Kab. Grobogan	% OPD dengan pengamanan informasi	100 %	71.500.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan tidak secara langsung memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga tidak ada usulan program, kegiatan dan sub kegiatan pemangku kepentingan yang bersumber dari masyarakat secara langsung atau diluar organisasi perangkat daerah.

Adapun pemangku kepentingan di sini hanya dari dalam organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan sendiri.

Berikut akan disajikan Tabel Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Grobogan	% Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi	98 %	
	a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Grobogan	% informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten yang dikelola	78 %	
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Grobogan	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	
	a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Grobogan	% Nama Domain dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Dan Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet Dari Dinas KOMINFO	100 %	
	b. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Grobogan	% Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government	100 %	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Grobogan	% layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 %	
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Grobogan	% dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	

	Perangkat Daerah		kinerja berkualitas		
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	% pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 %	
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	% penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	100 %	
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	% pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	
	e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Grobogan	% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	
	f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Grobogan	% pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	
	g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Grobogan	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Grobogan	% Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	100 %	
	a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Grobogan	% OPD yang memiliki buku profil data statistik	100 %	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Grobogan	% Informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	100 %	
	a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Grobogan	% OPD dengan pengamanan informasi	100 %	
	b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Grobogan	% OPD dengan pengamanan informasi	100 %	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup : Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Untuk Dinas Komunikasi dan Informatika masuk dalam Pembangunan Infrastruktur pada Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Untuk Transformasi Digital yang meliputi :

1. Penuntasan Infrastruktur TIK
2. Pemanfaatan Infrastruktur TIK
3. Fasilitas Pendukung Transformasi Digital

Sedangkan Arah dan Prioritas Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari" yang akan dicapai dengan empat sasaran pembangunan daerah meliputi:

- a. meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan;
- b. meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
- c. meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis;

Renstra Kemenkominfo Tahun 2021-2026 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka menengah selama Tahun 2021-2026 yaitu Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah. Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.
- 3) Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tersebut, maka Diskominfo sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian, penetapan pola hubungan komunikasi sandi yang memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan adalah ***“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”***. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing
4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Berdasarkan pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Grobogan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan mensupport pencapaian misi ke Misi 4 yaitu Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni, Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD maka rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

Tujuan : Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Adapun sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi, dengan indikator capaian Indeks SPBE
2. Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan indikator capainnya Indeks KAMI
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Satu data, dengan indikator capaiannya Presentase Data Urusan Teranalisis
4. Meningkatnya tata kelola dinas, dengan indikator capaiannya nilai SAKIP
5. Meningkatnya kualitas dan inovasi dalam pelayanan public, dengan indikator capaiannya IKM.

Berikut disajikan pada tabel 3.1, Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan beserta Indikator dan Target Kinerja yang sudah ditentukan dan tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran, Indikator Tujuan dan Target Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun
						2025
1	Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		SPBE	Indeks SPBE pada instrumen penilaian KEMENPAN RB	nilai	3,4
			Nilai SAKIP	Evaluasi oleh Kemen PAN-RB berdasarkan: upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, pedoman akuntabilitas kinerja yang telah disusun, pemutakhiran data kinerja yang dilakukan secara berkala	nilai	BB (72)
			Nilai IKM	Rerata capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik pada PD	nilai	B (83,58)
		1. Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi,	SPBE	Indeks SPBE pada instrumen penilaian KEMENPAN RB	nilai	3,4
		2. Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik,	Indeks KAMI	Indeks KAMI pada instrumen penilaian BSSN	nilai	III

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun
						2025
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan Satu data.	Presentase Data Urusan Teranalisis	$\frac{\text{Data Urusan Wajib dan Pilihan yang teranalisis}}{\text{Data Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah kota}} \times 100\%$	%	65
		Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	SAKIP	Evaluasi oleh Kemen PAN-RB berdasarkan: upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, pedoman akuntabilitas kinerja yang telah disusun, pemutakhiran data kinerja yang dilakukan secara berkala	nilai	BB (72)
			IKM	Rerata capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik pada PD	nilai	B (83,58)

Kemudian akan dijabarkan kedalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sesuai dengan Arah Kebijakan RKPD Tahun 2025 dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sesuai Arah Kebijakan RKPD dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

No	RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024		KEBIJAKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN GROOGAN TAHUN 2024		Kegiatan & Sub Kegiatan
	Arah Kebijakan	Program	Arah Kebijakan	Program	
1	Penguatan Daya Saing SDM dan Perekonomian Daerah, didukung peningkatan reformasi birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Responsif, Prpfesional, dan Modern	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota a. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik b. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik c. Pengelolaan Media Komunikasi Publik d. Penguatan Kapasitas Sumber

					Daya Komunikasi Publik e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas f. Penyediaan/Pengad aan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota a. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota b. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

					Kabupaten/Kota c. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

					- a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - b Penyediaan Bahan Logistik Kantor - c Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - e Penyediaan Bahan/Material - f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah a. Pengadaan Mebel b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - a Penyediaan Jasa Surat Menyurat - b Penyediaan Jasa Komunikasi,
--	--	--	--	--	--

					Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
--	--	--	--	--	--

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah pada pasal 1 ayat (30) disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut dimaksudkan untuk mencapai sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta lokasi pembangunan yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Demikian pula dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang diwujudkan dalam dokumen Renja yang memuat urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta lokasi pembangunan yang sudah di masukkan kedalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI yang sudah digunakan oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diwajibkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Tabel 4.1

Rencana Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan

	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					17.786.398.500,00				15.654.611.365,00	
ASAR					17.786.398.500,00				15.654.611.365,00	
					13.954.721.732,00				15.099.611.365,00	
					6.129.071.732,00				6.004.611.365,00	
					72.984.200,00				80.000.000,00	
umen perencanaan, anggaran dan evaluasi a berkualitas	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	5 Laporan	100 %	72.984.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	80.000.000,00

					3.925.083.532,00					3.505.611.365,00
nbayaran gaji dan ngan ASN tepat waktu	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	32 Orang/b ulan	100 %	3.925.083.532,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang /bulan	3.505.611.365,00
					284.394.000,00					320.000.000,00
nyelelesaian administrasi awaian tepat waktu	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	1 Paket	100 %	44.394.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	50.000.000,00

	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
Penyelesaian administrasi pemerintahan tepat waktu	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	60 Orang	100 %	240.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	270.000.000,00
					984.000.000,00				1.120.000.000,00	
Penyediaan Administrasi dan Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	1 Paket	100 %	16.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00
Penyediaan Administrasi dan Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	1100 Paket	100 %	342.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yang Disediakan	1100 Paket	350.000.000,00

Penyediaan Administrasi n Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	1 Paket	100 %	54.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00
Penyediaan Administrasi n Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	72 Dokumen	100 %	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	72 Doku men	15.000.000,00
Penyediaan Administrasi n Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	1 Paket	100 %	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 Paket	75.000.000,00

	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
Penyusunan Administrasi Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	500 Laporan	100 %	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	600.000.000,00
					155.000.000,00				200.000.000,00	
Penyediaan Barang Milik Daerah dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	51 Unit	100 %	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	51 Unit	50.000.000,00
Penyediaan Barang Milik Daerah dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	25 Unit	100 %	120.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	150.000.000,00
					206.000.000,00				239.000.000,00	
Penyusunan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	1 Laporan	100 %	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000,00

menenuhi kebutuhan menunjang Urusan Pintahan Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	12 Laporan	100 %	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan	12 Laporan	175.000.000,00
menenuhi kebutuhan menunjang Urusan Pintahan Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	12 Laporan	100 %	54.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000,00
					501.610.000,00					540.000.000,00
Pelayanan Dinas Jabatan										

	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
ntase Barang Milik h Penunjang Urusan rintahan Daerah yang ihara	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	7 Unit	100 %	81.610.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	100.000.000,00
ntase Barang Milik h Penunjang Urusan rintahan Daerah yang ihara	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	290 Unit	100 %	170.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	290 Unit	190.000.000,00
ntase Barang Milik h Penunjang Urusan rintahan Daerah yang ihara	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	4 Unit	100 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	4 Unit	250.000.000,00
					2.202.000.000,00					2.555.000.000,00
					2.202.000.000,00					2.555.000.000,00

Informasi terkait program kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten yang	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	98 %	1 Dokumen	78 %	116.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	120.000.000,00
Informasi terkait program kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten yang	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	98 %	1 Dokumen	78 %	56.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	70.000.000,00
Informasi terkait program kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten yang	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	98 %	3 Dokumen	78 %	58.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	80.000.000,00

	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
Informasi terkait program kebijakan pemerintah dan perintah kabupaten yang	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	98 %	25 Orang	78 %	24.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	25 Orang	35.000.000,00
Informasi terkait program kebijakan pemerintah dan perintah kabupaten yang	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 %	5 Dokumen	78 %	1.735.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendi seminasikan Informasi Program atau Kebijakan	5 Dokum en	2.000.000.000,00
h Daerah Kabupaten/Kota										
Informasi terkait program kebijakan pemerintah dan perintah kabupaten yang	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	98 %	27 Unit	78 %	213.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabu paten/Kota	27 Unit	250.000.000,00

					5.623.650.000,00					6.540.000.000,00
Main di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					4.524.375.000,00					5.250.000.000,00
na Domain dan Sub in Di Lingkup rintah Daerah Dan isasi Perangkat Daerah erhubung Dengan Internet DariDinas NFO	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	375 Domain	100 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/K ota	375 Domain	150.000.000,00
han Daerah Kabupaten/Kota										

	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
ma Domain dan Sub in Di Lingkup rintah Daerah Dan isasi Perangkat Daerah Terhubung Dengan Internet DariDinas NFO	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Dokumen	100 %	3.824.375.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pe natalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penye lenggaraan P emerintahan Daerah Kabu paten/Kota	7 Dokum en	4.400.000.000,00
ma Domain dan Sub in Di Lingkup rintah Daerah Dan isasi Perangkat Daerah Terhubung Dengan Internet DariDinas NFO	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	1 Unit	100 %	600.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	700.000.000,00
					1.099.275.000,00				1.290.000.000,00

giatan perangkat daerah erkait Sistem rintahan Berbasis onik (E-Government)	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	2 Dokumen	100 %	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pe merintahan Berbasis Elektronik	2 Dokum en	250.000.000,00
giatan perangkat daerah erkait Sistem rintahan Berbasis onik (E-Government)	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	213 Unit	100 %	169.550.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikemb angkan	213 Unit	200.000.000,00
giatan perangkat daerah erkait Sistem rintahan Berbasis onik (E-Government)	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	273 Layanan	100 %	55.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	273 Layanan	70.000.000,00

	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
Kegiatan perangkat daerah terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	107.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	120.000.000,00
h										

giatan perangkat daerah erkait Sistem rintahan Berbasis onik (E-Government)	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	1 Dokumen	100 %	220.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembang an dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokum en	250.000.000,00
giatan perangkat daerah erkait Sistem rintahan Berbasis onik (E-Government)	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	12 Dokumen	100 %	282.825.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	12 Doku men	300.000.000,00
giatan perangkat daerah erkait Sistem rintahan Berbasis onik (E-Government)	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	1 Dokumen	100 %	64.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan P enyelenggar aan SPBE	1 Dokum en	100.000.000,00
					170.000.000,00					215.000.000,00
					170.000.000,00					215.000.000,00
					170.000.000,00					215.000.000,00

	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
D yang memiliki buku data statistik	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	1 Dokumen	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	75.000.000,00
egras									

D yang memiliki buku data statistik	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	325 Orang	100 %	105.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	325 Orang	120.000.000,00
D yang memiliki buku data statistik	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	11 Dokumen	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	11 Dokumen	20.000.000,00
					295.000.000,00					340.000.000,00
					295.000.000,00					340.000.000,00
aten/Kota					33.000.000,00					40.000.000,00
h Kabupaten/Kota										
D dengan pengamanan nasi	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	1 Dokumen	100 %	33.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	40.000.000,00
					262.000.000,00					300.000.000,00

	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
D dengan pengamanan nasi	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	100 %	49 Perangkat Daerah	100 %	262.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	49 Perangkat Daerah	300.000.000,00
TOTAL					14.419.721.732,00				15.654.611.365,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025 disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan tahun 2021 – 2026..

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan segenap jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis OPD Tahun 2021 – 2026 untuk Tahun Anggaran 2025.

Beberapa kaidah pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan 2025 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang – bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan agar mendukung pencapaian target – target Rencana Kerja (Renja) dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renja dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang – bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dapat menjalin

- koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam ranwal renja ini dapat tercapai;
3. Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu satu tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan renja wajib berpedoman pada Renstra;
 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan secara berkala;
 5. Keberhasilan pencapaian target yang tertuang dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan diperlukan sinergitas dan dukungan dari stakeholder dan Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Kabupaten Grobogan;
 6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Purwodadi, 20 Maret 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. MUHAMMAD ZAKIR WALAD, M.T.

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19730824 199203 1 002